

**STUDI KELAYAKAN DAN PROPOSAL
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S2 ILMU PEMERINTAHAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**



OLEH :

- 1. PROF. DR. SUFIAN HAMIM, M.SI**
- 2. NURMAN, S.SOS, M.Si**

PEKANBARU, JULI 2006

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil'alamin segala Puji dan Syukur kehadirat illahirobby, dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah Studi Kelayakan dan Proposal Pembukaan Program Studi S2 Ilmu Pemerintahan, salawat beriring salam kepada junjungan umat Rasulullah Nabi Muhammad, S.A.W., tokoh pencerah alam yang mampu menghidupkan ghiroh ilmu semesta alam, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini.

Studi Kelayakan dan Proposal ini merupakan suatu terobosan gagasan visioner untuk UIR berkembang pesat dalam tatanan persaingan perguruan tinggi di Indonesia dan Unggul di Asia Tenggara. Terlaksananya organisasi yang profesional sesuai dengan perkembangan zaman.

Terhadap Pimpinan yang telah ikhlas memberikan ruang dan waktu serta dorongan buat penulis untuk dapat menyelesaikan buku hasil karya dari studi kelayakan dan proposal ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas pengorbanan dan pengertiannya, demikian kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini.

Kepada Allah SWT secara khusus penulis mengharapkan ramat dan ridho-Nya agar penulis dapat tekun untuk mampu berkreasi serta berekspresi dalam tuangan tinta ide tulisan hingga menjadi lanjutan rangkaian kata-kata dan argumentasi kedalam bentuk topik kajian dan buku lainnya.

Pekanbaru, 2006

Ketua Tim Studi Kelayakan,

Sufian Hamim

DAFTAR ISI

Bab I : PENDAHULUAN.....	1
A. Profil Universitas Islam Riau.....	1
B. Potensi Universitas Islam Ri.....	2
C. Visi dan Misi, Tujuan dan Strategi Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan....	5
BAB II : STUDI KELAYAKAN PEMBUKAAN PROGRAM PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU.....	7
A. Kualifikasi yang Dibutuhkan.....	7
B. Gambaran Jumlah Kebutuhan.....	12
C. Sumbangan Masukan Program.....	13
D. Keberlanjutan Program.....	15
BAB III : KURIKULUM.....	16
A. Kualifikasi Kompetensi Keluaran yang Diharapkan.....	16
B. Kurikulum.....	16
C. Rujukan Program Yang Digunakan	21
BAB III : SUMBER DAYA.....	23
A. Dosen.....	23
B. Sarana dan Prasarana.....	23
C. Tenaga Administrasi dan Penunjang Akademik.....	26
BAB IV : PENDANAAN.....	28
A. Kebutuhan Dana Investasi.....	28
B. Kebutuhan Dana Operasional dan Pemeliharaan.....	28
C. Penerimaan Internal.....	30
D. Penerimaan Eksternal.....	30
BAB V : MANAJEMEN AKADEMIS.....	32
A. Rencana Pengembangan Program Studi.....	32
B. Manajemen Sumberdaya.....	33
C. Manajemen Mutu Akademis.....	35
D. Dukungan Kerjasama.....	48
BAB VI : PENUTUP	50
DAFTAR PUSTAKA.....	54
TIM STUDI KELAYAKAN DAN PENGUSUL PROPOSAL.....	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Profil Universitas Islam Riau

Atas berkat rahmat Allah SWT dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk menyempurnakan pendidikan Islam sebagai upaya membangun manusia seutuhnya. Sadar bahwa tugas tersebut merupakan bagian amanah, tugas dan kewajiban bersama, maka didirikanlah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Daerah Riau yang disingkat dengan YLPI. Yayasan ini didirikan pada tanggal 25 September 1951 dengan kegiatan dibidang pendidikan, sosial dan dakwah. Pada tanggal 4 September 1962 YLPI membuka Universitas yang dinamai Universitas Islam Riau disingkat dengan UIR. Sebelum Universitas Islam Riau didirikan YLPI telah meletakkan pondasi pendidikan dalam bentuk Taman kanak-kanak Islam (TKI), Sekolah Dasar Islam (SDI), Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) dan Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI).

Keberadaan Universitas Islam Riau ditujukan sebagai bentuk peran serta YLPI dalam membantu kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan. Keberadaan institusi perguruan tinggi ini diharapkan mengambil andil dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan terwujudnya manusia seutuhnya yang bersusila, taat kepada Allah SWT berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya Universitas Islam Riau untuk mencapai tujuan ini adalah dengan berusaha melahirkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik professional yang diharapkan mampu menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna meningkatkan taraf hidup masyarakat disamping memperkaya khasanah budaya nasional.

B. Potensi Universitas Islam Riau

Guna menjawab berbagai dan permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini dalam skala nasional dan daerah, maka Universitas Islam Riau bermaksud mengembangkan diri dengan mendirikan Program Pascasarjana baru, yaitu Magister Ilmu Pemerintahan. Dalam rangka mempersiapkan sumberdaya manusia yang bergerak dibidang pemerintahan guna mengatasi dan mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan tenaga profesional dibidang pemerintahan tersebut di Riau. Disini dirasa penting pendirian program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan dan mendesak untuk direalisasikan.

Universitas Islam Riau merencanakan akan mendirikan Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan seperti yang telah direncanakan dalam buku Induk Pengembangan Universitas Islam Riau. Pada saat ini UIR telah memiliki 8 (delapan) fakultas dan 2 Program Studi Pascasarjana yang mandiri dan 2 Program pascasarjana Kerjasama dengan UNPAD Badung dan Universitas Budi Utoma Surabaya serta 1 (satu) program doctor (S3) bekerjasama dengan Universitas Utara Malaysia.

Jumlah Fakultas, Jurusan/Program Studi dan Status Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Riau

No.	Fakultas/Jurusan/ Program Studi	Status/Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Agama Islam √ Aqidah Filsafat √ Komunikasi Penyiaran Islam/dakwah √ Ekonomi Islam (Syariah) √ Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah)	Proses Akreditasi Proses Akreditasi Proses Akreditasi Proses Akreditasi
2	Hukum √ Ilmu Hukum	Berakreditasi / B
3	Pertanian √ Budidaya Pertanian √ Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis	Berakreditasi / B Berakreditasi / B

	√ Budaya Perairan	Berakreditasi / C
4	Teknik √ Teknik Mesin √ Teknik Perminyakan √ Teknik Sipil √ Planologi	Akreditasi /C Berakreditasi / C Berakreditasi / B Izin Operasional
5	Ekonomi √ Ekonomi Pembangunan √ Akuntansi √ Manajemen	Berakreditasi / B Berakreditasi / C Berakreditasi / C
6	Ilmu Pendidikan dan Keguruan √ Pendidikan Biologi √ Pendidikan Matematika √ Pendidikan Bahasa Inggris √ Pendidikan Bahasa Indonesia √ Pendidikan Olahraga (Penjaskestek) √ Pendidikan Kesenian (Sendratasik) √ Pendidikan Akuntansi	Berakreditasi / C Berakreditasi / C Berakreditasi / B Proses Akreditasi Berakreditasi / B Berakreditasi / B Izin Operasional
7	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik √ Administrasi Negara √ Administrasi Niaga √ Ilmu Pemerintahan √ Kriminologi √ Diploma Tiga Kesekretariatan	Berakreditasi / B Berakreditasi / B Berakreditasi / B Izin Operasional Menunggu Hasil
8	Psikologi	Izin Operasional

Sumber : Universitas Islam Riau, 2006

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau

No.	Program Magister	Status
1	Agronomi	Izin Dikti No. 2283/D/T/2003
2	Ilmu Hukum	Izin Dikti No. 681/D/T/2004

Sumber : Universitas Islam Riau, 2006

C. Visi dan Misi, Tujuan dan Strategi Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan

a. Visi

Adapun visi dari Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau adalah Menjadi Institusi yang mampu menghasilkan lulusan dibidang manajemen pemerintahan daerah yang religius, responsive, kritis, serta berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan institusi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

b. Misi

Sejalan dengan visi di atas, maka Misi Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau adalah :

- Menghasilkan lulusan pascasarjana ilmu pemerintahan yang tangguh dan profesional yang mampu bersaing secara regional, nasional dan internasional.
- Menghasilkan lulusan pascasarjana ilmu pemerintahan yang tangguh dan professional dibidang manajemen pemerintahan daerah.
- Menghasilkan lulusan pascasarjana ilmu pemerintahan yang mandiri dan mampu menciptakan dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah.

c. Tujuan

a. Tujuan Umum :

Sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 60 tahun 1999, maka tujuan pendidikan tinggi yaitu :

- a). Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan IPTEK dibidang Pemerintahan.
- b). Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang profesional dibidang pemerintahan.

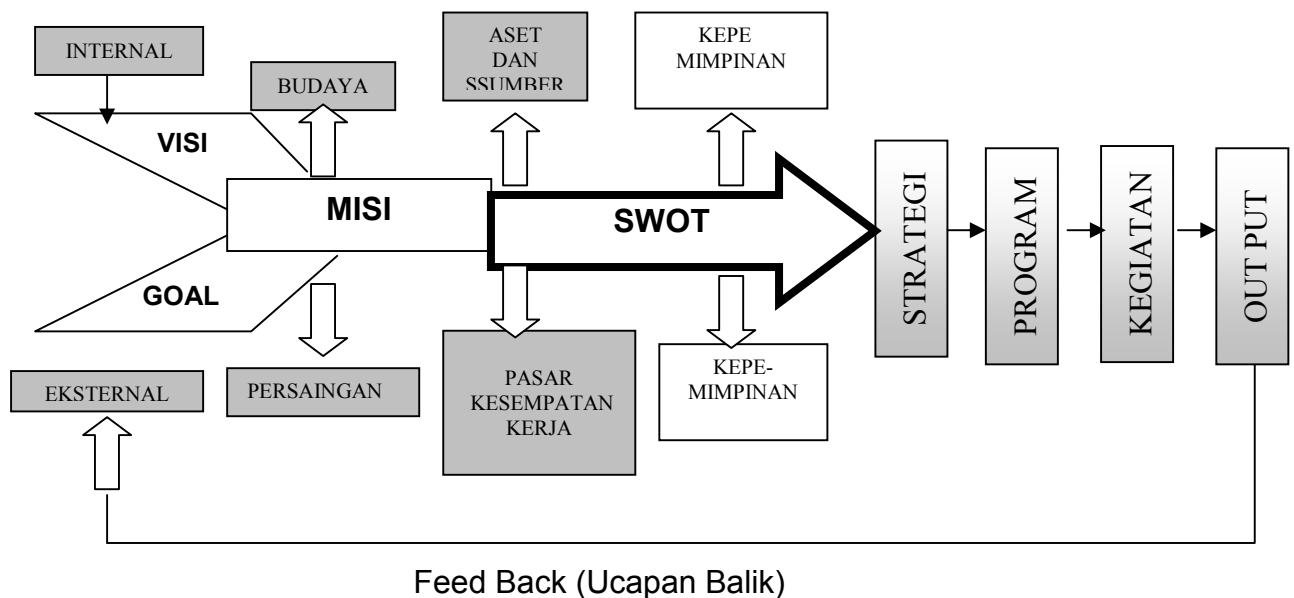
b. Tujuan Khusus :

Program pascasarjana Ilmu Pemerintahan memiliki tujuan khusus sebagai berikut :

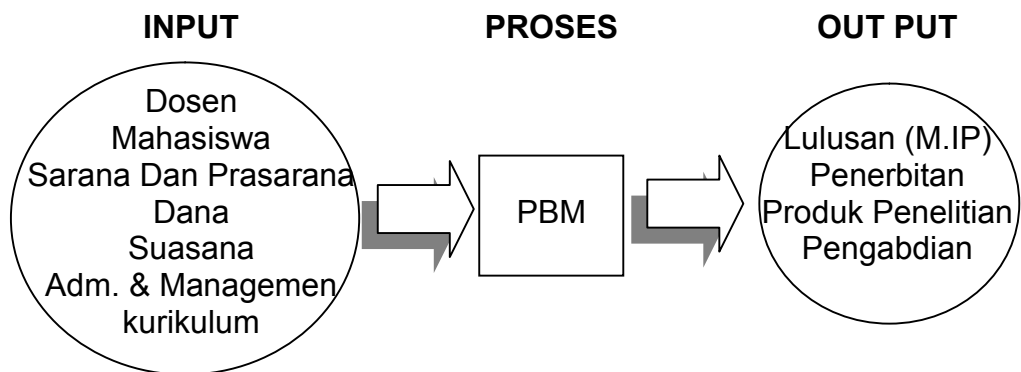
- a). Menghasilkan lulusan pascasarjana ilmu pemerintahan yang tangguh dan profesional yang mampu bersaing secara regional, nasional dan internasional.
- b) Menghasilkan lulusan pascasarjana ilmu pemerintahan yang tangguh dan professional dibidang manajemen pemerintahan daerah.
- c) Menghasilkan lulusan pascasarjana ilmu pemerintahan yang mandiri dan mampu menciptakan dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah khususnya dan Ilmu Pemerintahan pada umumnya.

d. Strategi

Adapun strategi yang digunakan dalam pengembangan program pascasarjana ilmu pemerintahan adalah sebagai berikut :



e. Proses Input dan Output



Input program pascasarjana ilmu pemerintahan Universitas Islam Riau terdiri dari dosen, mahasiswa, sarana dan prasarana, suasana/iklim akademik, administrasi dan manajemen, serta kurikulum. Input tersebut setelah melalui proses pembelajaran akan melahirkan output. Output program pascasarjana ilmu pemerintahan adalah lulusan yang unggul dan mandiri, penerbitan yang unggul, produk penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang unggul dan memuaskan.

BAB II

STUDI KELAYAKAN PEMBUKAAN PROGRAM PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU

A. Kualifikasi Yang Dibutuhkan

Perkembangan mutakhir saat ini memperlihatkan setidaknya ada dua kecenderungan utama yakni; Pertama, pada skala lokal dan nasional terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kebijaksanaan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan desentralisasi fiskal dalam wujud otonomi daerah yang telah berjalan beberapa waktu, hal tersebut membawa implikasi kepada bergesernya aktifitas pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan dari yang sebelumnya serba berpusat di 'Jakarta' menjadi terdesentralisasi ke daerah-daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua, pada tataran global dan regional kekinian sedang berproses suatu model interdependensi ekonomi internasional yakni bentuk regionalisme ekonomi (AFTA, APEC) serta semakin kuat berlangsungnya perdagangan bebas dunia (WTO).

Kedua kecendrungan utama di atas membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga menuntut kemampuan serta kemandirian dalam melaksanakan pembangunan, artinya pemerintah daerah beserta segenap komponen masyarakat di daerah dituntut dapat menjalankan otonomi daerah tersebut secara maksimal.

Persoalannya adalah terletak sejauh mana kesiapan masing-masing daerah di Indonesia terutama dalam kesiapan sumberdaya manusia (SDM) baik masyarakat maupun aparatur pemerintahan daerah sendiri dalam menjalankan otonomi daerah tersebut.

Provinsi Riau, dengan 9 Kabupaten dan 2 Kota termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang relatif kaya, akan tetapi memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia. Beberapa indikator keterbatasan tersebut setidaknya tergambar dalam catatan di bawah ini :

1. Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2002 berjumlah 5.307.867 jiwa, dengan laju pertumbuhan 3,79 persen.
2. Jumlah penduduk Propinsi Riau yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah berjumlah kurang lebih 64,5%.
3. Sementara penduduk Propinsi Riau yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) berjumlah 17,21 %, berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) berjumlah 15,53% dan hanya 2,57 % penduduk Riau berpendidikan perguruan tinggi.

Data umum di atas berkorelasi dengan kondisi spesifik Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pemerintah Daerah, setidaknya tergambar dengan melihat kasus spesifik di Pemerintahan daerah Provinsi Riau sebagaimana yang tersaji dalam data di bawah ini . Total aparat Pemerintah Provinsi Riau yang tercatat di kantor Badan Administrasi Daerah Provinsi Riau (BADP) tercatat sebanyak 6.228 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah ini tersebar diberbagai tingkat pendidikan, mulai dari SD, SLTP, SLTA sampai keperguruan tinggi.

Dalam rangka percepatan perwujudan sumberdaya manusia Riau khususnya dan provinsi-provinsi tetangga umumnya, maka diperlukan pengembangan dan pembukaan program pascasarjana yang dapat menyerap lulusan S1 baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.

Dalam konteks tersebut, merupakan peluang bagi Universitas Islam Riau untuk menjaring calon mahasiswa yang akan meneruskan studi ke jenjang pascasarjana (S2) Ilmu Pemerintahan, selain juga untuk mempersiapkan tenaga aparatur pemerintahan daerah yang lebih berkualitas dimasa mendatang juga mempersiapkan tenaga edukatif yang professional sebagai tenaga pengajar diperguruan tinggi. Penjaringan calon mahasiswa dapat pula dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun pihak swasta.

Lebih jauh disadari, peranan perguruan tinggi dalam menjawab tantangan di atas menjadi begitu penting dan berarti. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka, Universitas Islam Riau, khususnya Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik berkewajiban memasuki ruang pemberdayaan SDM tersebut secara optimal, terencana dan profesional.

Dalam rangka menindak-lanjuti pemikiran di atas, maka rencana pembukaan program Magister Ilmu Pemerintahan setidaknya mempunyai arti strategis bagi pemberdayaan Sumber Daya Manusia ditingkat lokal secara khusus, menuju optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah serta rencana umum meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Riau dan sekitarnya.

Rencana pembukaan program Magister, program studi Ilmu Pemerintahan lebih jauh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti berikut :

1. Undang –undang dasar 1945, khususnya alinea IV pembukaan yang mengamanatkan pentingnya pencerdasan kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam pasal 31 UUD 1945 disebutkan juga bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (ayat 1), pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-

undang (ayat 2). Semangat yang terkandung dalam pasal dan ayat UUD tersebut tidak hanya menggambarkan soal hak dari rakyat atau publik semata untuk mendapatkan pengajaran/pendidikan melainkan secara langsung juga memberikan kewajiban kepada pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi rakyat. Dalam konteks tersebut terdapat relevansi antara amanat undang-undang dasar dengan rencana penyelenggaraan program Magister (S-2) Ilmu Pemerintahan.

2. Garis Garis Besar haluan Negara (GBHN) bab IV huruf E angka 11 garis Garis besar Haluan Negara 1999-2004 menyebutkan bahwa perkembangan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualifikasi sumber daya manusia Indonesia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di daerah terpencil.
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk turut berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional (ayat 1). Selanjutnya pasal 33 menjelaskan bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan atau keluarga peserta didik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. PP ini menyebutkan bahwa pendidikan tinggi dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Depdiknas) atau departemen lain, atau lembaga

pemerintah non-departemen, atau oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh masyarakat.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 Tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 2 ayat (6) Keputusan menteri ini menyebutkan bahwa : Universitas terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan program S-1 dan atau Program Diploma dan terdiri atas dua jurusan atau lebih yang menyelenggarakan satu atau lebih program studi dan bagi yang memenuhi syarat dapat pula menyelenggarakan program S-2, Program S-3.

Berdasarkan uraian di atas, paling tidak ada beberapa alasan mengapa program pascasarjana ilmu pemerintahan diperlukan, yakni : **Pertama**, letak geografis provinsi Riau yang sangat strategis, mudah dijangkau melalui transportasi darat, laut dan udara. **Kedua**, provinsi Riau memiliki sumber daya alam yang melimpah, karena itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan secara profesional untuk mengelolanya. **Ketiga**, adanya pemekaran beberapa wilayah kabupaten/kota di Riau yang memerlukan sumberdaya pemerintahan yang profesional. **Keempat**, belum adanya program pascasarjana ilmu pemerintahan di Sumatera umumnya dan di provinsi Riau khususnya.

C. Gambaran Jumlah Kebutuhan.

Provinsi Riau merupakan daerah yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam pengembangan sektor pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat. Hal ini berhubungan dengan letak geografis Provinsi Riau, di jalur internasional. Letak seperti ini memberikan memberikan peluang dan tantangan bagi pengembangan potensi sumber daya manusia dan potensi alam. Dengan demikian, Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR diharapkan dapat memanfaatkan peluang serta menjawab tantangan tersebut.

Lulusan pendidikan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan dapat mengisi jabatan atau bidang pekerjaan dalam masyarakat, meliputi :

1. Sebagai tenaga edukatif di perguruan tinggi
2. Sebagai tenaga peneliti di Lembaga Penelitian
3. Mengisi jabatan tertentu di instansi pemerintah seperti asisten I, kabag dan kasubag pemerintahan, camat, lurah serta dinas yang terkait seperti dinas; kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat, KESBANG, INFOKOM, BAPPEDA/BAPPEKO, BAWASDA, LITBANK, SETPOL serta stap secretariat daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
4. Antisipasi serta pengisian jabatan dan anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota.
5. Sebagai Wirausaha yang merupakan pilar good governance

C. Sumbangan Masukan Program

Mahasiswa program pascasarjana Ilmu Pemerintahan berasal dari lulusan starta satu (S1) berbagai disiplin ilmu. Untuk tahun pertama (tahun ajaran 2006/2007) diprediksikan dapat menampung 40 orang mahasiswa (2 lokal), baik dari alumni sendiri, birokrasi, akademisi maupun dari kalangan eksekutif.

Jumlah peminat program pascasarjana ini diprediksikan akan dapat bertahan paling tidak lima tahun ke depan. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan sekitar 10 s/d 20 % lulusan S1 Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau.

Selain itu, adanya kebijakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di provinsi Riau dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawainya untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 yang diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa.

Jumlah dan tingkat pendidikan PNS dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau

No	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)	Keterangan
1	SD	323	
2	SLTP	189	
3	SLTA	3025	
4	D3	365	
5	S1	1707	Peluang ke S2
6	S2	216	
7	S3	3	
	Jumlah	6228	

Sumber : BADP Riau, Tahun 2006

Dari table di atas, terdapat 1707 orang PNS yang berpendidikan S1 yang memiliki peluang untuk melanjutkan studinya ke jenjang S2. Kondisi PNS untuk tingkat pemerintah provinsi, PNS yang berpendidikan S2 baru berjumlah 3,47 % sementara yang berpendidikan S1 mencapai 27,4%. Jumlah mahasiswa PPs Ilmu Pemerintahan (prediksi 5 tahun) 2007-2011 terlihat pada table sebagai berikut :

Jumlah Mahasiswa PPs Ilmu Pemerintahan (Prediksi 5 tahun) 2007-2008

Tahun Masuk	Ts	Ts-1	Ts-2	Ts-3	Ts-4	Jumlah Lulusan
2007	40	38	5	-	-	-
2008	-	50	45	10	-	-
2009	-	-	60	55	10	35
2010	-	-	-	60	55	45
2011	-	-	-	-	60	60

Sumber : Data prediksi lima tahun (2007-2011)

D. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program pascasarjana ilmu pemerintahan akan dapat dipertahankan, karena Universitas Islam Riau memiliki sarana dan prasarana pendukung seperti gedung perkuliahan, perpustakaan baik ditingkat universitas maupun ditingkat fakultas, labor computer dan internet, pengalaman pengelolaan (manajemen) dan tenaga dosen serta staf administrasi yang relative cukup dan berpengalaman.

Berdasarkan perkembangan jumlah peminat program S1 ilmu pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau selama 4 tahun terakhir terjadi peningkatan. Kondisi ini diikuti oleh jumlah lulusan terjadi peningkatan sekitar 20 s/d 30 persen pertahun.

Disisi lain, adanya komitmen pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota provinsi Riau untuk memberikan kesempatan bagi PNS yang ingin melanjutkan studinya ke S2. Dan satu-satunya program pascasarjana ilmu pemerintahan yang ada diwilayah kopertis X Padang (Sumbar-Riau-Jambi).

Dengan demikian, keberlanjutan program studi ini diperkirakan 10-15 tahun kedepan memiliki peluang yang besar, karena pasar (peminat) yang jelas baik dari unsur birokrasi, akademisi dunia usaha maupun dari unsur masyarakat lainnya.

III. KURIKULUM

A. Kualifikasi Kompetensi Keluaran Yang Diharapkan

Lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau yang akan dihasilkan memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut :

1. Memiliki dasar kepribadian dalam Ilmu Pemerintahan, sosial, agama dan kebangsaan yang tinggi.
2. Memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan pengembangan Ilmu Pemerintahan secara professional, serta menguasai dasar ilmu untuk mengidentifikasi masalah terkait.
3. Mampu menerapkan lptek pengembangan Ilmu Pemerintahan serta berkomunikasi dengan administrator baik nasional maupun internasional.
4. Mampu menerapkan lptek dan pengembangan Ilmu Pemerintahan dalam masyarakat.
5. Memiliki integritas moral dan ketakwaan serta tanggung jawab yang profesional.

B. Kurikulum

Program studi Ilmu Pemerintahan menekankan pada ilmu-ilmu dasar dan terapan dalam bidang manajemen pemerintahan yang disesuaikan dengan spesifikasi dalam rangka penyusunan tesis dan bidang pekerjaan yang ditekuni calon mahasiswa. Kurikulum program studi ilmu pemerintahan berbasis kompetensi sesuai dengan SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 yang terdiri dari Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) dan mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Disamping itu, bagi calon mahasiswa yang kualifikasinya kurang terutama dari jurusan non Ilmu Pemerintahan

diharuskan mengambil mata kuliah matrikulasi non kredit. Adapun sebaran mata kuliah tersebut dapat disajikan pada table sebagai berikut.

Komposisi Mata kuliah PPs. Ilmu Pemerintahan
Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan

No	NAMA MATA KULIAH	BOBOT SKC
I. Kelompok Mata Kuliah Berbasis Kompetensi		45
A. Kelompok Mata Kuliah MPK		2
1	Etika Pemerintahan.	2
B. Kelompok Mata Kuliah MKK		17
1	Filsafat Ilmu	2
2	Filsafat Dan Teori Politik	2
3	Konstitusi Dan Kelembagaan Negara	2
4	Kebijakan Publik	2
5	Metodologi Ilmu Pemerintahan	3
6	Metodologi Penelitian Kualitatif	2
7	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2
8	Teori-Teori Pembangunan	2
C. Kelompok Mata Kuliah MKB		15
1	Pemerintahan Lokal (Daerah)	3
2	Hubungan Pusat Dengan Daerah	2
3	Keuangan Publik	2
4	Manajemen Pemerintahan	3
5	Analisis Sumberdaya Daerah	3
6	Statistik Sosial	2
D. Kelompok Mata Kuliah MPB		4
1	Teori Budaya	2
2	Pelayanan Sipil Dan Pelayanan Publik	2
E. Kelompok mata Kuliah MBB		7
1	Tesis	6
2	Seminar Usulan Penelitian Tesis	1
II. Kelompok Mata Kuliah Matrikulasi		
1	Pengantar Ilmu Pemerintahan (Cybernology)	-
2	Dasar-Dasar Ilmu Sosial	-
3	Penyegaran Bahasa Indonesia sebagai Bhs Akademis	-
4	Penyegaran Bahasa Inggris Untuk Tofel	-
5	Teknik Penulisan Tesis Dan Karya Ilmiah	-

**KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
PROGRAM PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN
SESUAI DENGAN SK. MENDIKNAS NO. 232/U/2000 DAN NO. 045/U/2002**

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)					
Kompetensi Utama		Kompetensi Pendukung		Kompetensi Lain	
<i>Memiliki dasar kepribadian dalam Ilmu Pemerintahan,, moral agama dan kebangsaan yang tinggi</i>		<i>Memiliki penguasaan bahasa dengan baik dan benar untuk mengkombinasikan gagasan</i>		<i>Memiliki dasar jiwa sosial yang kuat</i>	
Mata Kuliah	SKS	Mata Kuliah	SKS	Kompetensi lain	SKS
1. Etika Pemerintahan	2				
Jumlah	2	Jumlah		Jumlah	
Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)					
Kompetensi Utama		Kompetensi Pendukung		Kompetensi Lain	
<i>Memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan pengembangan ilmu pemerintahan secara profesional, serta menguasai dasar ilmu untuk mengidentifikasi masalah terkait</i>		<i>Memahami dan menguasai dasar-dasar ilmu pendukung untuk mengembangkan pemerintahan secara profesional dan dasar-dasar dalam menganalisa masalah pemerintahan</i>		<i>Mampu memahami permasalahan terkait dalam pengembangan ilmu sosial yang berbasis ilmu pemerintahan</i>	
1. Filsafat Ilmu	2	1. Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	1. Teori-teori Pembangunan	2
2. Filsafat Dan Teori Politik	2	2. Metodologi Penelitian Kualitatif.	2		
3. Konstitusi & Kelembagaan Negara.	2	3. Metodologi Penelitian Kuantitatif.	2		
4. Kebijakan Publik	2				
Jumlah	8	Jumlah	7	Jumlah	2

Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)					
Kompetensi Utama		Kompetensi Pendukung		Kompetensi Lain	
<i>Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan ilmu pemerintahan serta berkomunikasi dengan administrator baik nasional maupun internasional</i>		<i>Menguasai keahlian khusus untuk mendukung tercapainya kompetensi utama</i>		<i>Menguasai ilmu-ilmu dasar terkait dan memahami permasalahan dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan administrasi publik</i>	
Mata Kuliah	SKS	Mata Kuliah	SKS	Kompetensi lain	SKS
1. Pemerintahan Lokal (Daerah) 2. Hubungan Pusat Dengan Daerah 3. Keuangan Publik	3 2 2	1. Manajemen Pemerintahan 2. Analisis Sumberdaya Daerah	3 3	1. Statistik Sosial	2
Jumlah	7	Jumlah	6	Jumlah	2
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)					
Kompetensi Utama		Kompetensi Pendukung		Kompetensi Lain	
<i>Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan ilmu pemerintahan dalam masyarakat</i>		<i>Menguasai ilmu pengetahuan pendukung pemahaman administrasi publik serta mampu merencanakan penelitian terkait</i>		<i>Menguasai permasalahan kemasyarakatan serta mampu menganalisisnya</i>	
Mata Kuliah	SKS	Mata Kuliah	SKS	Kompetensi lain	SKS
1. Teori Budaya 2. Pelayanan Sipil & Pelayanan Publik	2 2				
Jumlah	4	Jumlah		Jumlah	
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)					
Kompetensi Utama		Kompetensi Pendukung		Kompetensi Lain	
<i>Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan ilmu pemerintahan dan menulis satu karya</i>		<i>Memahami lingkungan budaya sekitar yang terkait dengan kegiatan pemerintahan</i>			
1. Tesis	6	1. Seminar Usulan Penelitian	1		
Jumlah	6	Jumlah		Jumlah	
Jumlah	22	Jumlah	12		4

Kompetensi Mata Kuliah

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian :

Etika Pemerintahan (3 SKS) kode mata kuliah : MPK. 231

Bertujuan untuk memberikan pemahaman sentuhan antara pemerintah dan etika dalam menentukan pertimbangan, keputusan, tindakan dan pertanggungjawaban serta reward and punishment dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Setelah mahasiswa mengikuti materi pembelajaran diharapkan memiliki dasar kepribadian dalam ilmu pemerintahan, moral agama dan kebangsaan yang tinggi.

2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan :

a. Filsafat Ilmu (2 SKS) Kode Mata Kuliah : MKK. 111

Berjutan untuk memberikan pengetahuan sifat, asumsi, anatomi ilmu pengetahuan dan kebenaran, proses berpikir serta metode ilmu dan metode penelitian.

Setelah mahasiswa mengikuti materi pembelajaran diharapkan memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan pengembangan ilmu pemerintahan secara professional, serta menguasai dasar ilmu untuk mengatasi masalah terkait.

b. Filsafat dan Teori Politik (2 SKS) Kode Mata Kuliah : MKK.114

Berjutan untuk memberikan pengetahuan pada pembelajaran S2 perbedaan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu politik (sudut pandang dan cara pendekatannya)

Setelah mahasiswa mengikuti materi pembelajaran diharapkan memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan pengembangan ilmu pemerintahan secara professional, serta menguasai dasar ilmu untuk mengatasi masalah terkait.

c. Konstitusi dan Kelembagaan Negara (2 SKS) Kode Mata Kuliah : MKK. 119

Berjutan untuk membahas konstitusi, lembaga-lembaga kenegaraan, perilaku Negara, sistem kekuasaan dan sebagainya.

Setelah mahasiswa mengikuti materi pembelajaran diharapkan memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan pengembangan ilmu pemerintahan secara professional, serta menguasai dasar ilmu untuk mengatasi masalah terkait.

d. Kebijakan Publik (2 SKS) Kode Mata Kuliah : MKK. 127

Berjutan untuk menjelaskan proses dan siklus input-output kebijakan publik, control, evaluasi dan feedbacknya. Mengetahui isu-isu dan permasalahan kebijakan public.

Setelah mahasiswa mengikuti materi pembelajaran diharapkan memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan pengembangan ilmu pemerintahan secara professional, serta menguasai dasar ilmu untuk mengatasi masalah terkait.

**e. Metodologi Ilmu Pemerintahan (3 SKS) Kode Mata Kuliah :
MKK. 128**

Berjutan untuk menjelaskan perbedaan antara metodologi penelitian dengan metodologi pemelitan ilmu pemerintahan konstruktif teoritik dalam penulisan tesis.

Setelah mahasiswa mengikuti materi pembelajaran diharapkan mampu melakukan penelitian ruang lingkup ilmu pemerintahan dengan logika dan prosedur yang benar.

**f. Motodologi Penelitian Kualitatif (2 SKS) Kode Mata Kuliah :
MKK. 112**

Berjutan untuk menjelaskan proses penelitian dan penggunaan dalam pembuatan tesis hubungan antara konsep atau fenomena, peramalan, ujicoba, survey dan sebagainya.

Setelah mahasiswa mengikuti materi pembelajaran diharapkan mampu melakukan penelitian kualitatif dengan logika dan prosedur yang benar.

**g. Metodologi Penelitian Kuantitatif (2 SKS) Kode Mata Kuliah :
MKK.113**

Berjutan untuk menjelaskan proses penelitian dan penggunaannya dalam penulisan tesis

Setelah mahasiswa mengikuti materi pembelajaran diharapkan mampu melakukan penelitian kualitatif dengan logika dan prosedur yang benar.

h. Teori Pembangunan (2 SKS) Kode Mata Kuliah : MKK.116

Berjutan untuk menjelaskan konsep, teori dan perkembangan administrasi pembangunan di Negara-negara maju, Negara-negara berkembang, nasional, daerah dan pembangunan di pedesaan Indonesia.

Setelah mahasiswa mengikuti materi pembelajaran diharapkan mampu memahami permasalahan terkait dalam pengembangan ilmu social yang berbasis ilmu pemerintahan.

3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya :

**a. Pemerintahan Lokal (Daerah) (3 SKS) Kode Mata Kuliah :
MKB.122**

Berjutan untuk menjelaskan konsep-konsep dasar pemerintahan daerah, perencanaan, subyek dan obyek pembangunan daerah, sehingga pembelajar mampu menganalisis dan memberikan solusi berbagai problematika penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional.

Setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan ilmu pemerintahan serta berkomunikasi dengan administrator baik regional, nasional maupun internasional

**b. Hubungan Pusat Dengan Daerah (2 SKS) Kode Mata Kuliah :
MKB.121**

Berjutan untuk menjelaskan sistem yang dipakai dalam menjalankan pemerintahan daerah, susunan dan pengisian jabatan, kewenangan dan tugas-tugas pemerintah daerah.

Setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan ilmu pemerintahan serta berkomunikasi dengan administrator baik regional, nasional maupun internasional.

c. Keuangan Publik (2 SKS) Kode Mata Kuliah : MKB.234

Berjutan untuk menjelaskan berbagai aspek keuangan public dalam skop makro, seperti penerimaan dan pengeluaran Negara untuk pembangunan, baik secara konseptual maupun kebijakan Negara dengan studi kasus di Indonesia.

Setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan ilmu pemerintahan, menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan publik serta berkomunikasi dengan administrator baik regional, nasional maupun internasional.

d. Manajemen Pemerintahan (3 SKS) Kode Mata Kuliah : MKB.236

Berjutan untuk menjelaskan konsep dan teori serta perkembangan manajemen pemerintahan.

Setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran diharapkan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan sumber organisasi pemerintahan.

e. Analisis Sumberdaya Daerah (3 SKS) Kode Mata Kuliah : MKB.235

Berjutan untuk menjelaskan konsep dan teori serta perkembangan pelayanan sivil dan pelayan publik.

Setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran diharapkan memiliki kemampuan untuk menggali dan mengelola sumber daya daerah dalam meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan sumber organisasi pemerintahan.

f. Statistik Sosial (2 SKS) Kode Mata Kuliah : MKB.123

Berjutan untuk menjelaskan karakteristik statistik, pengenalan analisis data hasil penelitian sehingga dapat membuat kesimpulan secara objektif dan rasional.

Setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran diharapkan memiliki kemampuan untuk mendapatkan, mengolah dan menganalisis data yang akan mengeluarkan informasi sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya :

a. Teori Budaya (2 SKS) Kode Mata Kuliah :MPB.232

Berjutan untuk menjelaskan konsep dan teori nilai baik mulai dari input, proses dan output serta struktur masyarakat.

Setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan ilmu pemerintahan dalam kehidupan masyarakat.

b. Pelayanan Sipil dan Pelayanan Publik (2 SKS) Kode Mata Kuliah :MPB.121

Berjutan untuk menjelaskan perbedaan pelayanan sipil dengan pelayanan public secara teoritis dan berdasarkan UUD 1945 pasal 26 dan pasal 43.

Setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan ilmu pemerintahan dalam kehidupan masyarakat.

5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat :

Tesis (6 SKS) Kode Mata Kuliah :MBB.242

Bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep, teori dan aplikasi serta menganalisis data empiris.

Setelah mahasiswa selesai melakukan penelitian tesis mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan ilmu pemerintahan dan mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Masa Studi

Program Pascasarjana UIR program studi Ilmu Pemerintahan akan memakan waktu selama 24 bulan dengan pola sistem kredit catur wulan dengan rincian sebagai berikut :

1. Matrikulasi selama 4 bulan.
2. Masa Pembelajaran selama 18 bulan.
3. Menyelesaikan tugas akhir (Seminar/ujian tesis) selama 2 (dua) bulan

Dengan demikian, maka setiap tahun ajaran dapat menerima 1(satu) atau 2 (dua) kali periode penerimaan mahasiswa baru.

C. Rujukan Program Yang Digunakan

Pengelolaan program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dalam rangka persiapan pembukaan Program Pascasarja Ilmu Pemerintahan telah mempelajari sistem penyelenggaraan

Program Pascasarjana Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta dan PPs MAPD
STPDN Bandung yang akan dijadikan sebagai rujukan.

III. SUMBER DAYA

A. Dosen

Untuk memenuhi persyaratan pembukaan Program pascasarjana sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, maka Program Pascasarjana Universitas Islam Riau memiliki tenaga pengajar tetap sebagai berikut :

Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Sebagai Personel Gransi

No	Nama	Jabatan Akademik	Keterangan
1	Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha	Guru Besar	Ilmu Pemerintahan
2	Prof. Dr. Sufian, M. Si	Guru Besar	Manajemen Pemerintahan
3	Dr. H. Syaifuudin Syukur, M. SC	Lektor	Manajemen Pemerintahan Daerah
4	Dr (Cand) Drs.H. Azam Awang,M. Si	Lektor	Ilmu Pemerintahan
5	Drs. Rahyunir Rauf, M. Si	Lektor	Ilmu Pemerintahan
6	Dra. Monalisa, M. Si	Lektor	Manajemen Pemerintahan Daerah
7	Dr. Yahudu Immanuel, MM	Lektor	Ilmu Pemerintahan
8	Sola Gratia Ndraha, M. Si	Lektor	Ilmu Pemerintahan

Sumber : Fisip UIR, 2006

Guru Besar dan Dosen Luar Biasa Pascasarjana

Ilmu Pemerintahan

No	Nama	Jabatan Akademik	Keterangan
1	Prof. Dr. Hj. Nurul Aini, MA	Guru Besar	Ilmu Politik
2	Prof. Dr. H. Djadja Syaufflah, MA	Guru Besar	Ilmu Sosial
3	Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS	Guru Besar	Ilmu Pemerintahan
3	Prof. Dr. Hj. Sjamsiar Sj Indradi	Guru Besar	Hukum Administrasi Negara
4	Prof. Dr. N. Euis Fatimaf, M. Si	Guru Besar	Kebijakan Publik
5	Prof.Dr. Atory Bin Khusien, MA	Guru Besar	Administrasi Pembangunan
6	Prof.Dr. Jauhari	Guru Besar	Ilmu Sosial
7	Dr. Detri Karya, SE. MA	Lektor	Manajemen Pembangunan
8	Dr. Alimin Siregar, M. Si	L. Kepala	Ilmu Politik

Sumber : Fisip UIR, 2006

Dosen Tetap Fakultas Sebagai Tenaga Pendukung Proses Belajar-Mengajar
Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan

No	Nama	Jabatan Akademik	Keterangan
1	Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH.M.CL	Guru Besar	Ilmu Hukum
2	Dr. Hj. Sri Wahyuni, SH. M. Si	Lektor	Ilmu Hukum
3	H. Yusri Munaf, SH. H. Hum	Lektor Kepala	Hukum Bisnis
4	Drs. H. Tarmizi Yussa, MA	Lektor	Ilmu Politik
5	Drs. Zulkifli, M. Si	Lektor	Administrasi Publik
6	Drs. Syafhendri, M. Si	Lektor	Ilmu Politik
7	Nurman, S. Sos. M. Si	Lektor	Perencanaan Wilayah
8	T. Rafizal, S. Sos. M. Si	L. Kepala	Ilmu Sosial
9	Indra Syafri, S. Sos. M.	Lektor	Keuangan Daerah
10	Drs. Parjiana, M. Si	Asisten ahli	Ilmu Sosial
11	Arief Rifa'i. H, S. Sos. M. Si	Lektor	Administrasi Bisnis
12	Abdul Aziz, S. Sos. M. Si	Asisten Ahli	Komunikasi Pembangunan
13	Rosmayani, S. Sos. M. Si	Lektor	Administrasi Bisnis
14	Kartius, S. Sos. M. Si	-	Administrasi Publik
15	La Ode Syarfan, SE. M. Si	-	Akuntansi Publik
16	Syahrul Akmal Latif, S. Ag. M. Si	-	Ilmu Sosial
17	Drs. H. Hasan Basri, M. Si	-	Ilmu Pemerintahan

Sumber : Fisip UIR, 2006

B. Sarana dan Prasarana

Pada saat ini Universitas Islam Riau telah memiliki berupa gedung dan tanah yang seluruhnya terletak di jalan kaharuddin nasution Km.11 Perhentian Marpoyan Pekanbaru. Aset tersebut adalah berupa; ruang kuliah (33.600 m²), ruang Pimpinan (930 m²), ruang Administrasi (1.890 m²), ruang Dosen (1.200 m²), ruang Perpustakaan (800 m²), laboratorium (940 m²), Ruang Komputer dan Internet (430 m²), ruang kegiatan Mahasiswa (600 m²), Gedung serba guna (1000 m²), kebun Percobaan (50.600 m²), asrama Mahasiswa (2.600 m²), sarana olah raga (13.000 m²), Masjid kampus (764 m²), dan cadangan untuk pengembangan (200.000 m²). Sementara itu ada juga satu bangunan berlantai dua seluas 700 m² yang merupakan sumbangan PT. Caltex Pacifik Indonesia (CPI). Sedangkan untuk penyelenggaraan program Pascasarjana, Universitas Islam Riau sudah pula memiliki gedung berlantai 2 dengan luas 1.800 m² yang merupakan bantuan Pemerintah Provinsi Riau. Gedung ini dilengkapi dengan

ruang belajar AC, ruang Ketua Program Pascasarjana, ruang istirahat, dan ruang sholat (Gambar Gedung dan ruang Belajar Pascasarjana dapat dilihat di lampiran). Dengan semua fasilitas yang dimiliki UIR, maka ditinjau dari kondisi yang demikian selayaknyalah Pembukaan pascasarjana UIR tersebut dapat terlaksana.

Untuk menunjang kegiatan akademik, Universitas Islam Riau telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Khusus untuk program pascasarjana, pihak Universitas Islam Riau telah menyiapkan lahan berikut bangunan berlantai dua yang terletak di Kampus UIR, Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru sebagai sarana kegiatan belajar Program pascasarjana Universitas Islam Riau

Disamping itu fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang telah tersedia di Universitas Islam Riau disasarkan sebagai wahana penunjang program pascasarjana antara lain: Laboratorium Komputer, Laboratorium Pusat Bahasa, Internet, Perpustakaan Universitas, Perpustakaan Fakultas dan ditambah Perpustakaan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Laboratorium Ilmu Pemerintahan, dan beberapa Pusat Kajian / Pusat Studi.

a. Perpustakaan

Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan tingkat magister, maka Universitas Islam Riau telah menyiapkan sarana kepastakaan, baik yang dimiliki oleh universitas dengan koleksi kurang lebih 26129 buah buku serta perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ditambah dengan koleksi buku yang dimiliki oleh program studi Ilmu Pemerintahan sekurang-kurangnya

kurang lebih 31.472 buah buku. Disamping itu di perpustakaan tersebut dilengkapi dengan koleksi jurnal nasional dan internasional.

b. Lembaga Penelitian

Salah satu lembaga penunjang akademik yang dimiliki Universitas Islam Riau adalah Lembaga Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau secara berkala menerbitkan jurnal penelitian, jurnal tersebut disasarkan sebagai wahana publikasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh staf pengajar semua program studi di lingkungan Universitas Islam Riau. Khusus untuk Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau saat ini juga tengah menyiapkan rancangan jurnal Pascasarjana yang diterbitkan perenambulan, untuk tahap awal direncanakan sejak program pascasarjana mulai berjalan, tulisan di jurnal akan diisi oleh hasil-hasil penelitian staf pengajar Program Pascasarjana untuk selanjutnya ditambah dengan hasil-hasil penelitian mahasiswa Program Pascasarjana sendiri.

c. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)

Dalam rangka implementasi salah satu tri dharma perguruan tinggi yakni pengabdian pada masyarakat, universitas Islam Riau melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) telah menjalankan misi tridarma tersebut. Bidang-bidang yang selama ini menjadi prioritas dalam pelaksanaan tri darma tersebut adalah turut mempromosikan pengembangan sumberdaya manusia, terutama sumber daya manusia pedesaan, melalui berbagai pelatihan-pelatihan. Disamping itu lembaga pengabdian masyarakat Universitas Islam Riau juga aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program, baik yang dilaksanakan secara mandiri, maupun secara bersama sama dengan berbagai perusahaan di Riau.

d. Fasilitas yang Dimiliki

Fasilitas fisik yang telah disediakan untuk kelancaran penyelenggaraan program sebagai berikut : 4 Ruang kuliah yang dilengkapi dengan AC, Wireless, meja, kursi, podium, OHP, Slide Projector, Infocus, white board, satu unit Laptop dan tiga set komputer. Ruang perpustakaan Universitas dan Fakultas serta perpustakaan Program Pascasarjana yang dilengkapi dengan 30 meja dan kursi baca dengan jumlah judul buku sebanyak 31.472 Judul buku dan jurnal ilmiah. Satu (1) unit laboratorium bahasa Inggris, Labor Komputer dan Internet. Peralatan lain seperti TV, video, photo copy dan alat mencetak serta sejumlah printer.

C. Tenaga Administrasi dan Penunjang Akademik

Untuk kelancaran pelayanan kegiatan akademik pada program Pascasarjana UIR dibutuhkan beberapa tenaga administrasi dan pendukung akademik yang mempunyai kualifikasi pendidikan S.1 dan D.3 dan tamatan SLTA. Tenaga administrasi untuk program studi Ilmu Pemerintahan ini akan dilakukan oleh tenaga administrasi Program Pascasarjana Fisipol Universitas Islam Riau kerjasama dengan Universitas Padjadjaran Bandung seperti terlihat dalam tabel 10 di bawah ini:

**Jumlah Tenaga Administrasi dan Penunjang Akademik
Program Pascasarjana Universitas Islam Riau**

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	Nurman, SE	Sarjana Ekonomi	Ka. TU	Administrasi
2.	Yustinus Zebua, SH.	Sarjana Hukum	Staf TU	Administrasi

3	Drs. Syafri A, M. Si	Magister Adm.	Staf TU	Administrasi
4	Tati Maharani, SP	Sarjana Pertanian	Staf TU	Administrasi
5	Tengku Ediyanto	STM	Staf TU	Administrasi
6	Firdaus, S.Sos.	Sarjana Fisipol	Ka. Pustaka Universitas	Pustakawan
7.	Amris, SH.	Sarjana Hukum	Ka. BAAK	UIR
8.	Ahmad Kamal, SH.	Sarjana Hukum	Ka. BAU	UIR
9.	M. Hariswanto, SE., M.Si	Magister Manajemen	Ka. Biro Keuangan	UIR

Sumber : Universitas Islam Riau, 2006.

Sumber daya lain yang dapat dipergunakan oleh program studi ini adalah laborototium ilmu pemerintahan, laboratorium internet dan laboratorium komputer.

IV. PENDANAAN

A. Kebutuhan Dana Investasi

Untuk menjaga kelangsungan aktivitas perkuliahan, program pascasarjana Ilmu Pemerintahan memprediksikan dana investasi yang berasal dari mahasiswa selama lima tahun kedepan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Kebutuhan Dana dan Investasi Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan

No	Tahun	Biaya Operasional (Rp)	Investasi (Rp)	Total
1	07/08	203.040.000	12.960.000	216.000.000
2	08/09	591.448.000	37.752.000	629.200.000
3	09/10	749.368.000	47.832.000	797.200.000
4	10/11	887.548.000	56.652.000	944.200.000
5	11/12	899.956.000	57.444.000	957.400.000
	Jumlah	3.331.360.000	212.640.000	3.544.000.000

Sumber : Data Prediksi Lima Tahun (2007-2011).

Sumber dana dari program pascasarjana Ilmu Pemerintahan untuk lima tahun kedepan diprediksikan tidak akan mengganggu sumber keuangan lain. Dengan kata lain, tanpa bantuan materil dari Yayasan, Universitas dan pemerintah, program studi pascasarjana Ilmu Pemerintahan dapat tertangani dengan baik tanpa harus mengorbankan kepentingan program studi lain.

B. Kebutuhan Dana Operasional dan Pemeliharaan

Untuk keperluan biaya operasional dan pemeliharaan, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) dan UIR juga akan menganggarkan dana secara bertahap untuk keperluan :

1. Komputer	Rp.	50.000.000,-
2. Perpustakaan	Rp.	200.000.000,-
3. Perlengkapan Administrasi	Rp.	75.000.000,-
4. Filing kabinet	Rp.	5.000.000,-
5. OHP dan White Board	Rp.	50.000.000,-
6. In fokus	Rp.	150.000.000,-
7.. Kenderaan Operasional	Rp.	150.000.000,-
Jumlah	Rp.	540.000.000,-

Dana investasi tersebut dipinjam dari YLPI Daerah Riau yang akan dikembalikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun. Investasi untuk gedung perkuliahan dan perkantoran tidak dilakukan, karena sudah disediakan oleh YLPI. Daerah Riau atau bantuan dana pemerintah Provinsi Riau.

Rencana pengeluaran pada pendidikan Pascasarjana UIR Program studi Ilmu Pemerintahan per enam bulan disajikan pada tabel 11 dibawah ini.

Tabel 11 . Jumlah Pengeluaran Program Studi Ilmu Pemerintahan Per Enam Bulan (dalam Rp.)

No	Uraian Pengeluaran	Volume	Satuan	Jumlah	Total
01	Honorarium dan Akomodasi :				
	1. Honorarium SKS 5 Guru Besar Tamu	60	SKS	Rp 350.000	Rp 21.000.000
	2. Transportasi 5 Guru Besar Tamu	5	PP	Rp 2.000.000	Rp 10.000.000
	3. Penginapan 5 Guru Besar Tamu	10	Hari	Rp 500.000	Rp 5.000.000
	4. Honorarium 1 Profesor Tetap	36	SKS	Rp 250.000	Rp 9.000.000
	5. Honorarium 1Doktor Tetap	24	SKS	Rp 175.000	Rp 4.200.000
	6. Honorarium 8 Magister	96	SKS	Rp 100.000	Rp 9.600.000
02	Tunjangan Jabatan Penanggung Tawab :				
	1. Rektor	6	Bulan	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	2. Dekan	6	Bulan	Rp 500.000	Rp 3.000.000
03.	Tunjangan Jabatan Pengelola :				
	1. Direktur	6	Bulan	Rp 2.000.000	Rp 12.000.000
	2. Sekretaris	6	Bulan	Rp 1.500.000	Rp 9.000.000
	3. Kepala Tata Usaha	6	Bulan	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	4. Staf Tata Usaha	6	Bulan	Rp 750.000	Rp 4.500.000
04.	Dana Persiapan Untuk Thesis:				
	1. Seminar Thesis	40 Mhs	Semester	Rp 250.000	Rp 10.000.000
	2. Bimbingan Thesis	40 Mhs	r	Rp 437.500	Rp 17.500.000
	3. Ujian Thesis	40 Mhs	Semester	Rp 250.000	Rp 10.000.000
			r		
			Semester		
			r		
05.	Transportasi	6	Bulan	Rp 500.000	Rp 3.000.000
06.	Listrik, Telepon dan Internet	6	Bulan	Rp 1.500.000	Rp 9.000.000
07.	Air Minum dan Snack	6	Bulan	Rp 200.000	Rp 1.200.000
08.	ATK	6	Bulan	Rp 300.000	Rp 1.800.000
09.	Dana Investasi/Pembangunan	6	Bulan	Rp 5.000.000	Rp 30.000.000
10.	Dana Cadangan	6	Bulan	Rp 5.000.000	Rp 30.000.000
	Jumlah	-	-	-	Rp 211.800.000

Sumber : Data Prediksi Tahun 2007.

C. Penerimaan Internal

Sumber dana dari program pascasarjana Ilmu Pemerintahan berasal dari penerimaan atas kewajiban yang dibebankan kepada mahasiswa. Kewajiban dan total penerimaan internal untuk lima tahun kedepan tergambar dari table sebagai berikut.

Total Penerimaan Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan (Prediksi 5 Thn) 2007-2011											
No	TA	Jlh. Mhs	Pendaftaran	SPP	Her	Semester	Seminar UP	Bimbingan Tesis	Ujian Tesis	Wisuda	Total
1	07/08	Baru 40	12.000.000	200.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	216.000.000
2	08/09	Baru 50	15.000.000	250.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	270.000.000
		Lama 38	-	190.000.000	11.400.000	3.800.000	21.000.000	70.000.000	35.000.000	28.000.000	359.200.000
3	09/10	Baru 60	18.000.000	300.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	324.000.000
		Lama 88	-	250.000.000	15.000.000	5.000.000	28.200.000	94.000.000	45.000.000	36.000.000	473.200.000
4	10/11	Baru 60	18.000.000	300.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	324.000.000
		Lama 5	-	325.000.000	19.500.000	6.500.000	37.200.000	124.000.000	60.000.000	48.000.000	620.200.000
5	11/12	Baru 60	18.000.000	300.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	324.000.000
		Lama 60	-	325.000.000	19.500.000	6.500.000	39.000.000	130.000.000	63.000.000	50.400.000	633.400.000
		Jumlah	81.000.000	2.440.000.000	65.400.000	48.800.000	125.400.000	418.000.000	203.000.000	162.400.000	3.544.000.000

Sumber : Data Prediksi Lima Tahun (2007-2011)

D. Penerimaan Eksternal

Sumber penerimaan diluar dari penerimaan program pascasarjana berasal dari berbagai sumber seperti :

1. Yayasan lembaga Pendidikan Islam (YLPI) daerah Riau
2. Universitas Islam Riau
3. Mahasiswa Program Pascasarjana
4. Beasiswa Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota se Riau.
5. Para donator dan sumberdana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan halal.

Penerimaan eksternal bersumber dari para donator dan sumber dana lain yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Donatur tersebut diantaranya dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemda Kabupaten/Kota dan perusahaan swasta yang jumlahnya pada tahun

pertama dan kedua sekitar Rp. 100.000.000,- per tahun. Jumlah ini akan menurun setiap tahunnya dan pada tahun kelima jumlah ini akan menjadi Rp. 30.000.000,-. Selanjutnya aliran kas dari pelaksanaan Program Studi Ilmu Pemerintahan selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 14 di bawah ini.

Perkiraan Perkembangan Kas Pascasarjana UIR Program Studi Ilmu
Pemerintahan Selama lima tahun kedepan (Rp 000)

Uraian	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	Jumlah
Penerimaan						
1. Yayasan	200.000	175.000	120.000	100.000	100.000	695.000
2. Doantur	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000	325.000
3. Mahasiswa	846.000	1.692.000	1.458.000	3.055.000	3.995.000	11.046.000
Total	1.146.000	1.941.000	1.628.000	3.205.000	4.145.000	12.066.000
Pengeluaran	423.600	508.320	609.980	731.976	877.371	1.053.755
Saldo						11.012.245

Sumber : Data Pprediksi Lima Tahun (2007-2011)

V. MANAJEMEN AKADEMIS

A. Rencana Pengembangan Program Studi

Dengan makin berkembangnya pembangunan di daerah Riau dan prakiraan-prakiraan pada masa datang di daerah ini, terutama selama otonomi daerah, maka kebutuhan masyarakat akan tenaga professional dibidang Ilmu Pemerintahan semakin meningkat. Untuk itu pengembangan pendidikan Pascasarjana UIR pada program ini pada masa akan datang diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan tenaga professional di bidang pemerintahan, selain itu juga diharapkan akan melahirkan kajian-kajian yang komprehensif dalam bidang ilmu pemerintahan. Untuk mencapai hal tersebut, maka pengembangan kurikulum local yang bersifat kompetensi mutlak dilakukan dengan dosen pengasuh mata kuliah yang berkualitas dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Oleh karena itu kurikulum akan dievaluasi setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan serta kebutuhan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Pada tahap awal (jangka pendek 1-3 tahun kedepan), program pascasarjana ilmu pemerintahan dikelola oleh pascasarjana Universitas Islam Riau yang sudah memiliki gedung dan manajemen pengelolaan sendiri. Konsentrasi ilmu yang dikembangkan dipokuskan pada "Manajemen Pemerintahan Daerah". Setelah program studi ini dianggap mapan dan didukung oleh sumber daya yang memadai, maka 5-10 tahun kedepan program studi ini sudah dapat dikelola langsung dibawah fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengembangkan berbagai konsentrasi ilmu sesuai dengan kebutuhan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Setelah program jangka menengah (5-10 tahun kedepan) berjalan dengan baik, untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan baik dari lembaga akademik, pemerintah dan dunia usaha, maka pengembangan untuk jangka panjang 15-25 tahun kedepan diarahkan untuk membuka program doktor (S3). Program jangka menengah dan program jangka panjang ini memiliki peluang untuk direalisasikan mengingat bahwa di Sumatera umumnya dan wilayah kopertis X (Sumber, Riau dan Jambi serta Kepulauan Riau) belum ada yang mengembangkan program studi pascasarjana Ilmu Pemerintahan.

B. Manajemen Sumberdaya

Saat ini pascasarjana Universitas Islam Riau memiliki gedung sendiri. Dalam menjalankan kegiatan operasional, pascasarjana dipimpin oleh seorang director (Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MC.L) Guru besar tetap Universitas Islam Riau, dan dibantu oleh satu orang asisten (Dr. Ir. Siti Zahara, MP) serta dua orang ketua program yaitu : Dr. H. Saifuddin Syukur, SH. M. CL untuk ilmu hokum dan Drs. Maizar, MP untuk program Agronomi.

Pada tahun pertama pendirian Pascasarjana Ilmu Pemerintahan sudah memiliki 2 orang dosen (Guru Besar), 1 orang Doktor dan 5 orang magister bidang ilmu pemerintahan sebagai personal garansi.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan proses belajar-mengajar, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau memiliki 17 orang dosen tetap dengan kualifikasi guru besar, doktor dan magister serta memiliki guru besar dan dosen luar biasa yang mengajar secara berkala di program S1.

Untuk menghadapi kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah mengirimkan 5 orang dosen tetap untuk melanjutkan studinya ke jenjang S3. Kebijakan ini akan terus

dilakukan, sehingga 5-10 tahun ke depan semua dosen tetap sudah memiliki kualifikasi pendidikan S3 dan kepangkatan akademik guru besar.

**Perediksi Pengembangan Pendidikan Dosen
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
5 Tahun Kedepan**

No.	Tahun Akademik	Kualifikasi Pendidikan	
		S.3	S.2
1	2006/07	3	20
2	2007/08	5	18
3	2008/09	6	17
4	2009/10	10	13
5	2010/11	12	11

Sumber : Fisip UIR, 2006

**Perdiksi Dosen dan Jumlah Mahasiswa
Program Studi Ilmu Pemerintahan 5 tahun Kedepan**

Kualifikasi Pendidikan	Tahun akademik				
	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Mahasiswa	684	804	904	1000	1100
Dosen Tetap	23	23	25	25	28
Dosen Tidak Tetap	12	12	10	9	9
Jumlah Dosen	35	35	35	34	37
Persentase dosen/hms	1: 19	1: 22	1: 26	1: 29	1 : 30

Sumber : Fisip UIR, 2006

**Prediksi Jabatan Akademis Dosen
Program studi Ilmu Pemerintahan 5 tahun Kedepan**

Jabatan Akademik	Tahun akademik				
	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Asisten Ahli	5	-	2	-	3
Lektor	14	18	17	16	12
Lektor Kepala	3	4	5	7	10
Guru Besar	1	1	1	2	3

Sumber : Fisip UIR, 2006

C. Manajemen Mutu Akademis

1. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan yang digunakan pada program pascasarjana ilmu Pemerintahan adalah Sistem Kredit Semester (system SKS). Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, beban pengalaman mengajar, dan penyelenggaraan program.

Satuan kredit semester (sks) diartikan sebagai kegiatan belajar yang setara dengan 50 menit secara kegiatan tatap muka terjadwal, 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit acara kegiatan mandiri. Oleh karena itu adanya perbedaan minat, bakat dan kemampuan antar mahasiswa, maka baik cara dan waktu untuk menyelenggarakan beban studi maupun komposisi kegiatan studi untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan, tidak harus sama bagi setiap mahasiswa.

2. Tujuan Sistem Kredit Semester

Tujuan pokok penggunaan system kredit semester program pascasarjana ilmu pemerintahan adalah :

- 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing.
- 3) Dapat melakukan penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu dan teknologi
- 4) Menyelenggarakan system evaluasi kecakapan dengan sebaik-baiknya.

3. Prinsip Umum Sistem Kredit Semester

- 1) Tidak ada kenaikan tingkat setiap tahunnya.
- 2) Jumlah kredit semester yang diambil pada setiap semester tidak harus sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa lainnya.
- 3) Waktu penyelesaian studi tidak sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa lainnya.
- 4) Komposisi pengambilan matakuliah tidak sama antara mahasiswa yang satu dengan lainnya.

4. Cisi-ciri system kredit semester

- 1) Dalam sistem kredit, bobot tiap mata kuliah dihargai dengan sks
- 2) Besar sks untuk kegiatan pendidikan yang berlainan tidak harus sama
- 3) Kegiatan pendidikan terdiri dari kegiatan wajib dan pilihan, kegiatan wajib diikuti oleh semua mahasiswa
- 4) Dalam batas-batas tertentu mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk menentukan beban sks yang diambil tiap semester, dan jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Jumlah sks yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu ditentukan oleh kemampuan studi mahasiswa pada semester sebelumnya, serta keadaan sosial ekonomi dan pribadi mahasiswa yang bersangkutan.

5. Beban Pendidikan dan Sistem Kredit

Beban pendidikan menyangkut beban studi bagi mahasiswa dan beban mengajar bagi dosen yang memerlukan suatu ukuran. Ukuran ini dinyatakan dalam satuan kredit. Oleh karena program pascasarjana menganut system semester maka satuan kredit ini disebut dengan SKS (satuan kredit semester).

1) SKS Untuk Mata Kuliah

SKS untuk mata kuliah diperhitungkan sebagai berikut; satu sks adalah kegiatan pendidikan selama 3 jam dalam seminggu. Hal ini terdiri 3 jam kuliah

yaitu tatap muka secara terjadwal ditambah satu jam kegiatan pendidikan rangkaian, yaitu kegiatan yang direncanakan oleh dosen tetapi tidak terjadwal, seperti pekerjaan rumah, paper dan sebagainya; dan satu jam lagi untuk kegiatan mandiri mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan materi kuliah (misalnya studi kepustakaan).

2) SKS untuk Seminar

Perhitungan sks untuk seminar sama dengan perhitungan untuk kuliah, Bobot kegiatan seminar yang dipresentasi oleh mahasiswa adalah 1 SKS.

3) SKS untuk Penelitian

Perhitungan sks untuk penelitian guna penyusunan tesis adalah serupa dengan perhitungan untuk praktek laboratorium. Untuk memperoleh gelar pascasarjana ilmu pemerintahan, penelitian dilakukan dalam bentuk penyusunan tesis dengan bobot 6 sks.

4) Penentuan Beban Studi Dalam Satu Semester

Penentuan beban studi untuk satu semester ditetapkan pada awal semester melalui konsultasi pembimbing akademik (PA). Penentuan beban studi tersebut disesuaikan dengan kemampuan seorang mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi semester sebelumnya, yang dapat diukur berdasarkan Index Prestasi (IP).

Adapun ketentuan umum yang berlaku bagi pengambilan sks mahasiswa diprogram studi Kriminologi FISIPOL UIR adalah :

- a) Batas minimal-maksimal sks yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah antara 9 s/d 15 sks.
- b) Pengambilan sks untuk mahasiswa aktif kembali berdasarkan gabungan IP semester terakhir aktif dengan IPK (berdasarkan perhitungan semester terakhir aktif).
- c) tugas akhir (tesis) diperhitungkan sebagai beban dalam perhitungan dari pengambilan sks.
- d) Mata kuliah yang nilainya belum keluar tidak diperhitungkan sebagai beban dalam perhitungan dari pengambilan sks.
- e) Mata kuliah dengan nilai E diperhitungkan sebagai beban dalam penghitungan IP

- f) Mata kuliah non sks (mata kuliah matrikulasi) tidak diperhitungkan sebagai beban pengambilan sks tetapi harus dicantumkan dalam sks.

5) Perencanaan Perkuliahan.

Registrasi Mahasiswa

Registrasi mahasiswa baru dilakukan secara terpusat di Universitas Islam Riau untuk pengurusan :

- a) Pembayaran SPP dan Tri Dharma melalui Bank Unisritama
- b) Pengisian data mahasiswa lengkap secara langsung (key-in)
- c) Pembuatan Kartu Mahasiswa di BAAK

Selanjutnya mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi akan menerima satu paket yang terdiri; katalog UIR, kalender akademik Universitas, dan buku panduan. Bagi mahasiswa lama, pelaksanaan registrasi sesuai waktu yang tertera pada kalender akademik UIR, mahasiswa menyerahkan berkas-berkas pada bagian pengajaran fakultas seperti; kwitansi pembayaran uang pembayaran dari Bank Unisritama, KRS yang telah ditandatangani PA dan telah distempel lunas oleh Biro Keuangan UIR.

6). Pengisian KRS

Mahasiswa yang aktif kuliah pada satu semester diwajibkan mengajukan/mengisi rencana studi yang dicantumkan dalam kartu rencana studi (KRS). Waktu pengisian KRS berdasarkan kalender akademik Universitas Islam Riau. Pengisian KRS mahasiswa dibimbing oleh Dosen penasehat akademis..

7). Ketentuan Prosedur dan Proses KRS

- a) Untuk dapat mengisi KRS mahasiswa harus sudah SPP
- b) Pengisian KRS dengan cara entry langsung oleh mahasiswa melalui komputer SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akademik)
- c) Waktu pengisian KRS tiap semester dilakukan selama 2 minggu
- d) Waktu perubahan KRS setiap semester dilakukan selama 1 minggu

Pengisian KRS Mahasiswa Baru

- a) Membawa kartu tanda mahasiswa asli atau sementara
- b) Memenuhi jadwal bimbingan yang ditetapkan

- c) Membawa KRS yang disediakan Bagian Administrasi Akademik
- Pengisian KRS mahasiswa Aktif Kuliah
- a) Membawa KHS semester aktif terakhir
 - b) Memenuhi jadwal bimbingan yang ditetapkan
 - c) Membawa KRS yang disediakan Bagian Akademik
 - d) Memenuhi semua kewajiban keuangan yang ditetapkan
 - e) Waktu pengisian KRS dilakukan selama 2 minggu
 - f) Jumlah SKS yang diambil ditetapkan berdasarkan IP

Pengisian KRS Mahasiswa Yang Tidak Aktif Kuliah

- a) Membawa surat keterangan aktif kuliah kembali
- b) Membawa KHS semester terakhir
- c) Memenuhi jadwal bimbingan yang ditetapkan
- d) Membawa KRS yang disediakan bagian akademik
- e) Telah meluansi semua kewajiban

Kalender Akademik

Kalender akademik program pascasarjana disesuaikan dengan kalender akademik yang ditetapkan Universitas Islam Riau. Secara umum format kalender akademik adalah sebagai berikut :

Format kalender akademik

Jangka Waktu	Jenis Kegiatan
2 minggu	Pendaftaran/Pengisian KRS semester ganjil
14 minggu	Kuliah semester ganjil
1-2 minggu	Ujian tengah semester
1-2 minggu	Ujian akhir semester
1-2 minggu	Yudicium
2 minggu	Pendaftaran/Pengisian KRS semester genap
14 minggu	Perkuliahan semester genap
1-2 minggu	Ujian tengah semester
1-2 minggu	Ujian akhir semester
1-2 minggu	Yudicium

Sumber : Kalender Akademik UIR

8). Pelaksanaan Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah yang telah diumumkan. Pada kuliah pertemuan pertama dosen pengampu akan menjelaskan pelaksanaan perkuliahan dan sistem evaluasinya. Pada setiap

pertemuan perkuliahan, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir kuliah dengan menggunakan daftar hadir kuliah yang disediakan bagian akademik pengelola. Apabila dosen pengampu berhalangan mengajar pada jadwal yang telah ditetapkan, dosen wajib memberitahukan minimal 1 hari sebelum perkuliahan, sedangkan penggantian waktu akan dibicarakan terlebih dahulu dengan mahasiswa serta dikonfirmasi dengan bagian akademik pengelola untuk dibuatkan pengumuman tertulis.

Kuliah umum/colloquium diselenggarakan minimal 1 kali dalam satu semester. Adapun materi kuliah umum/colloquium disesuaikan dengan topik dan pengembangan disiplin bidang ilmu pemerintahan.

9). Ujian dan Evaluasi Hasil Studi

Sistem Ujian dan Evaluasi

Ujian adalah salah satu alat evaluasi studi mahasiswa untuk mengukur tingkat kemampuan dan keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Ujian merupakan bagian dari mekanisme proses pengendalian mutu kelembagaan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh penyelenggara.

Ujian diselenggarakan secara berkala baik terjadwal maupun tidak terjadwal dan terdiri dari ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Ujian tengah semester diselenggarakan satu kali dalam satu semester secara terjadwal. Ujian akhir semester diselenggarakan secara terjadwal pada akhir semester. Kedua ujian tersebut diselenggarakan berdasarkan kalender akademik. Selain ujian kedua di atas, penilaian juga diperoleh melalui; tugas terstruktur dan tugas mandiri, laporan pengamatan, pekerjaan rumah, tanya jawab, kuis dan lain-lain.

Persyaratan Ujian

Persyaratan ujian yang harus dipenuhi oleh mahasiswa adalah :

- Melunasi uang SPP pada semester bersangkutan

- Memenuhi jumlah kehadiran kuliah minimal 75 % dari seluruh jumlah tatap muka.
- Memiliki kartu mahasiswa tahun akademik bersangkutan
- Menunjukkan Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disahkan
- Diwajibkan hadir 15 menit sebelum ujian dilaksanakan
- Mengenakan pakaian resmi ujian
- Bagi mahasiswi diwajibkan memakai selendang
- Selama ujian peserta ujian tidak dibenarkan meninggalkan ruangan ujian
- Peserta ujian tidak dibenarkan berbuat curang, mencontek, melihat catatan, memberikan jawaban kepada peserta lain, menggeser tempat duduk, meminjam alat tulis, dan berkomunikasi sesama peserta ujian.
- Teguran atas pelanggaran tata tertib tersebut hanya dilakukan satu kali, kalau yang bersangkutan masih melanggar tata tertib ujian yang bersangkutan dicatat dalam berta acara ujian, dan dianggap gugur dalam mata ujian bersangkutan.

Waktu Ujian

- Ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan secara terjadwal.
- Ujian selain ujian tengah semester dan ujian akhir semester (kuis, tugas khusus) pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan dosen bersangkutan.
- Ujian tengah semester dan ujian akhir semester berlangsung selama 2 minggu.

Hasil Ujian

- Nilai Hasil Ujian

Hasil ujian akhir mahasiswa diwujudkan dalam bentuk nilai akhir (NA). Nilai akhir merupakan gabungan antara nilai tengah semester dengan nilai akhir semester dan ditambah dengan tugas khusus, berdasarkan bobot yang ditentukan oleh dosen. Nilai akhir pada setiap mata kuliah dinyatakan dalam huruf A, B, C, D, dan E yang memiliki arti sebagai berikut ;

- A dengan bobot 4 Amat baik
- B dengan bobot 3 Baik
- C dengan bobot 2 Cukup
- D dengan bobot 1 Kurang

E dengan bobot 0 Gagal

Pengumuman hasil Ujian

Hasil ujian setiap mata kuliah dapat diumumkan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nilai ujian UTS dapat diumumkan dalam bentuk angka
- Nilai UAS diumumkan oleh fakultas dalam bentuk huruf

Kewajiban Hadir Mengikuti Ujian

Mahasiswa diwajibkan hadir dalam ujian sesuai jadwal, bila tidak hadir dinyatakan tidak menggunakan kesempatan ujian, untuk itu fakultas tidak menyelenggarakan ujian susulan.

Evaluasi Hasil Studi Semester

Evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dengan menghitung indeks prestasi (nilai rata-rata) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{IP} = \frac{\text{Jumlah SKS mata kuliah diambil} \times \text{nilai bobot masing-masing}}{\text{Jumlah SKS mata kuliah yang diambil}}$$

Untuk menghitung indeks prestasi nilai huruf diubah menjadi nilai bobot menurut daftar berdasarkan PP Nomor 30 tahun 1990 sebagai berikut ;

A = 4

B = 3

C = 2

D = 1

E = 0

Batas Waktu Penyelesaian Studi

Masa studi maksimal adalah 3 tahun. Pada akhir batas waktu studi dilakukan evaluasi hasil studi, bila ternyata syarat – syarat penyelesaian jenjang studi tidak dipenuhi, mahasiswa harus meninggalkan program stdi bersangkutan (DO).

Ketentuan Kelulusan dan Predikat Kelulusan

Mahasiswa habis teori adalah mahasiwa yang telah menempuh jumlah SKS yang diwajibkan program studi, kecuali tugas akhir (tesis)

Prosedur Penetapan Habis Teori

- Mengisi formulir permohonan habis teori yang disediakan fakultas

- Melampirkan transkrip nilai yang telah ditempuh dengan IPK >2.00, kecuali PPL, Skripsi dan tugas akhir
 - Penetapan mahasiswa habis teori diputuskan oleh fakultas
- Mahasiswa yang Mempunyai Status Habis Teori tidak diperkenankan mengambil teori lagi (mengambil baru/mengambil ulang).
- a. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program studi apabila telah menyelesaikan sejumlah sks yang ditentukan program studi, termasuk telah lulus pendadaran /ujian skripsi.
 - b. Pengesahan kelulusan secara format untuk suatu program studi dilakukan pada yudisium akhir
 - c. Yudisium akhir bagi mahasiswa dilakukan setelah mahasiswa lulus ujian pendadaran/skripsi, dan kepada mahasiswa berhak menyandang gelar kesarjanaan sesuai bidang yang ditekuninya, serta berhak memperoleh surat tanda tamat studi (ijazah) beserta transkrip nilai yang dicapai.
 - d. Predikat kelulusan untuk program sarjana adalah;
 - Predikat Memuaskan IPK 2,00 – 2,75
 - Predikat Sangat Memuaskan IPK 2,76 – 3,50
 - Predikat Cum Laude IPK 3,51

10). Tesis

Segala hal yang berkaitan dengan tesis mahasiswa dikoordinir oleh Ketua Program studi yang selanjutnya disebut dengan ujian tesis atau ujian komprehensif. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa dalam proses tesisi adalah sebagai berikut :

Pengajuan judul Tesis

Untuk dapat dipertimbangkan dalam proses pemilihan judul tesis, mahasiswa terlebih dahulu tercatat sebagai mahasiswa dengan status menyelesaikan tugas akhir (tesis). Untuk ini persyaratan administratif mahasiswa pada semester bersangkutan harus terlebih dahulu terpenuhi. Pendaftaran judul tesis diselenggarakan setiap bulan diawal semester, selanjutnya mahasiswa akan mendapatkan formulir berupa :

- Formulir ringkasan ide penelitian yang akan meminta mahasiswa mencantumkan judul, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, studi kepustakaan serta metode penelitian. Formulir

permintaan bimbingan yang harus diajukan ke dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pembantu setelah dilengkapi.

- Pernyataan menjaga etika akademik
- Kartu bimbingan

Jika judul dipandang layak untuk diangkat sebagai penelitian skripsi, mahasiswa kemudian menghubungi pembimbing utama dan pembimbing pembantu untuk mendapatkan persetujuan yang ditunjukkan dengan penandatanganan formulir permohonan bimbingan.

Pengajuan Proposal

Jika dosen pembimbing telah menyatakan setuju menjadi dosen pembimbing tesis yang diajukan mahasiswa, selanjutnya mahasiswa dapat menulis proposal lengkap menyangkut penelitiannya. Proposal merupakan rencana penelitian yang akan dilakukan mahasiswa sekaligus merupakan tahap awal penelitian. Oleh karena itu mahasiswa disarankan mengerjakan proposal dengan sungguh-sungguh karena akan menentukan kelancaran penelitian selanjutnya.

Proses Pembimbingan

Proses pembimbingan/konsultasi dapat dilakukan segera setelah pembimbing tesis setuju dengan judul yang diajukan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan mahasiswa dalam menjaga kelancaran konsultasi tesis adalah :

- a. Menetapkan jadwal pertemuan dengan dosen pembimbing, sehingga dapat diketahui waktu-waktu yang disediakan pembimbing bagi mahasiswa bersangkutan.
- b. Mengikuti aturan yang ditetapkan dosen pembimbing secara khusus.
- c. Memperhatikan dengan baik saran-saran yang diberikan dosen pembimbing, khususnya yang berkaitan dengan perbaikan tesis yang sedang diselesaikan.

Persetujuan Ujian

Jika mahasiswa telah selesai menulis laporan penelitian tesisnya, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk diuji, dengan terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan :

Syarat Akademik

- a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah, tanpa nilai D
- b. IPK minimal 3.00
- c. Nilai C diperbolehkan 10 % dari semua mata kuliah yang ditawarkan

Syarat Administrasi

- a. Melunasi semua kewajiban keuangan, termasuk uang bimbingan tesis dan uang ujian tesis.
- b. Terdaftar sebagai mahasiswa tahun akademik bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa tahun akademik bersangkutan.
- c. Menyerahkan kartu bimbingan tesis yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing Utama dan dosen pembimbing pembantu.
- d. Menyerahkan pas-photo hitam putih berukuran 4x6 sebanyak 6 lembar, ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
- e. Menyerahkan transkrip nilai yang ditandatangani ketua program
- f. Menyerahkan photo-copi ijazah sarjana (S1) yang dilegalisir
- g. Menyerahkan photo-copi tesis sebanyak 7 eksamplar
- h. Mengisi blansko pendaftaran

Ujian Tesis

- a. Ujian tesis dapat dilaksanakan setiap saat, sepanjang tidak dalam waktu libur resmi.
- b. Tim penguji tesis terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris, 3 orang anggota penguji.
- c. Pada saat ujian, peserta ujian diharuskan menunjukkan semua alat ukur/bukti penelitian, baik berupa angket, hasil tes, kaset rekaman dan lain-lain.
- d. Aspek penilaian dalam ujian skripsi adalah :
 - Sistematika
 - Metodologi
 - Isi/materi
 - Performance
 - Literatur/referensi yang dipergunakan
- e. Tim penguji akan melakukan diskusi sesaat setelah ujian tesis selesai untuk menyatakan lulus tidaknya mahasiswa bersangkutan dalam mempertanggungjawabkan tesisnya.

- f. Setelah ujian tesis selesai (lulus/lulus dengan revisi/tidak lulus) mahasiswa berdangdut segera mengambil blanko perbaikan tesis ke bagian pengelola (Tata Usaha) untuk diisi oleh Tim penguji tesis, dengan ketentuan :
- Bagi yang lulus sebagai syarat yudisium
 - Bagi yang mengulang, sebagai syarat untuk mendaftar ujian kembali, ditambah dengan 5 eksampul tesis.
 - Setiap ada perubahan judul tesis harus dilaporkan kepada pengelola program studi.
- g. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, yang bersangkutan akan mendapatkan kesempatan untuk ujian ulang, adapun jadwal ujian ulang ditentukan sebelum sidang diakhiri.

Revisi Tesis

- a. Mahasiswa yang diharuskan merevisi tesis, memperoleh catatan salinan revisi.
- b. Revisi yang telah dilakukan harus mendapatkan pemeriksaan dan disetujui oleh seluruh tim penguji yang ditandai dengan tandatangan pengesahan.
- c. Hasil akhir ujian tesis yang telah disetujui dan disahkan oleh tim penguji, selanjutnya digandakan sebanyak 7 eksampul dan dijilid dengan warna biru.
- d. Bagi mahasiswa yang melakukan revisi tesis melebihi batas waktu yang telah ditentukan, diharuskan untuk mengikuti ujian ulang dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

11). Yudisium

Yudisium merupakan suatu rangkaian proses akademik yang harus dilaksanakan oleh pengelola dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan diwisuda> Untuk itu mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tesis langsung diyudisium oleh ketua penguji mewakili direktur program pascasarjana. Persyaratan untuk mengikuti yudisium adalah :

- a. Telah dinyatakan lulus ujian tesis yang dibuktikan dengan berita acara ujian tesis.
- b. Bagi yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, diharuskan menyerahkan surat perbaikan tesis yang disahkan oleh tim penguji.

- c. Tesis yang telah dijilid dan ditandatangani oleh tim penguji dan panitia ujian serta distempel sesuai dengan tanggal penyerahan surat perbaikan, selanjutnya diserahkan kepada :
- Perpustakaan fakultas 1 eksamplar.
 - Pembimbing utama 1 eksamplar
 - Pembimbing pembantu 1 eksamplar
 - Ketua program studi 1 eksamplar
 - Tata Usaha Fakultas 1 eksamplar
 - Perpustakaan Universitas 1 eksamplar.
 - Yang bersangkutan 1 eksamplar
- d. Bukti penyerahan tesis dari semua yang ditetapkan diatas diserahkan kepada pengelola sebagai syarat pengambilan ijazah.

12). Kemahasiswaan dan Alumni

Program studi pascasarjana ilmu pemerintahan Universitas Islam Riau, dibuka untuk menampung lulusan S1 yang ada di propinsi Riau maupun yang berada diluar propinsi Riau, baik birokrat, dunia usaha dan masyarakat.

Pada pembukaan perdana program pascasarjana ilmu pemerintahan akan menjangking calon mahasiswa sebanyak 40 orang, yang ditempuh melalui ujian seleksi masuk mahasiswa baru Universitas Islam Riau.

Untuk memperkuat alumni agar dapat mengamalkan ilmunya, ada beberapa persiapan yang diberikan kepada alumni seperti kegiatan pelatihan persiapan kerja. Dalam kegiatan ini diharapkan wawasan tentang dunia kerja serta kemampuan teknis menjelang dan awal masa kerja dapat dimiliki alumni. Salah satu hal yang dapat diwujudkan adalah menyatu ke dalam Ikatan Alumni Universitas Islam Riau. Dimana ikatan semacam ini berguna untuk menjalin komunikasi antar alumni serta antara alumni dengan lembaga pengelola. Dengan ikatan alumni diharapkan dapat memperkuat keberadaan lembaga pengelola sekaligus dapat membuka jaringan lapangan kerja.

D. Dukungan Kerjasama

Penyelenggaraan kegiatan akademis akan berdaya guna jika mendapat dukungan baik secara internal maupun eksternal, sehingga dukungan tersebut

dapat menjadi kekuatan dan peluang dalam pengembangan kegiatan akademis. Dukungan eksternal tersebut dapat berupa kerjasama dengan pihak luar baik berkaitan dengan proses penyelenggaraan akademis maupun berhubungan dengan output seperti pemberdayaan alumni dalam kegiatan pemagangan.

Universitas Islam Riau telah menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, luar maupun dalam negeri, kerjasama ini berupa pertukaran mahasiswa, kerjasama apenelitian dan penggunaan laboratorium, penyelenggaraan pendidikan dan pertukaran/bantuan tenaga pengajar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas output melalui penyelenggaraan dan dukungan ana akademis. Disamping itu kerjasama juka dilakukan dengan perusahaan besar yang ada di Provinsi Riau yang konsen dengan pemerintahan daerah. Kerjasama ini dapat berupa donator, sumber (pemberi) beasiswa dan juga tempat pemagangan bagi mahasiswa UIR. Ini diharapkan akan dapat memacu pengembangan program studi di masa yang akan dating.

1. Kerjasama antara perguruan tinggi dalam dan luar negeri

- a. Universitas Utara Malaysia, Malaysia
- b. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- c. Universitas Saga, Jepang
- d. Universitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia
- e. Universitas Sumatera Utama, Medan
- f. Universitas Padjdjaran, Bandung
- g. Universitas sutomo, Surabaya
- h. Istitut Ilmu Pemerintahan (IIP), Jakarta.
- i. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Bandung.

2. Kerjasama dengan instansi Swasta dan Pemerintah

- a. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Republik Indonesia
- b. PT. Indah Kiat Pulp & paper Tbk.
- c. PT. Megakarsa Buanaloka
- d. Pengusaha Hutan Produksi PT. Nanjak Makmur
- e. PT. Caltex Pacifik Indonesia

VI. PENUTUP/KESIMPULAN

1. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

A. Kekuatan

- a. Tersedianya tenaga pengajar tetap PPs yang berkualifikasi akademik (berpendidikan S3 dan S2) yang cukup memadai.
- b. Tersedianya dosen tetap fakultas dengan kualifikasi Magister dan doktor dengan kepangkatan akademik lektor, lektor kepala dan guru besar
- c. Tersedianya sarana dan sarana perkuliahan dan ruang pendukung yang relatif mencukupi (gedung milik sendiri).
- d. Pengelola PPs yang berpengalaman mengelola program ilmu hukum ada Agronomi secara mandiri.
- e. Tersedianya tenaga pendukung pengelola administrasi akademik yang baik dan berpengalaman.
- f. Adanya dana cadangan universitas sebagai dana awal untuk biaya operasional.
- g. Tersedianya perpustakaan baik ditingkat universitas maupun ditingkat fakultas
- h. Tersedianya akses internet yang relative memadai.

B. Kelemahan

- a. Belum adanya sosialisasi pembukaan PPs Ilmu Pemerintahan kepada masyarakat.
- b. Belum memiliki izin pendirian PPs Ilmu Pemerintahan.

C. Peluang

- a. Banyaknya lulusan S1 di propinsi Riau, sehingga calon mahasiswa PPs Ilmu Pemerintahan diperkirakan akan diminati oleh masyarakat.
- b. Adanya peluang kerjasama dengan IIP Jakarta dan UNPAD Bandung dalam pengadaan tenaga pengajar.
- c. Satu-satunya PPs Ilmu Pemerintahan yang ada di Sumatera, sehingga peminat PPs ini diprediksinya datang dari provinsi-provinsi tetangga

seperti Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu dan Sumatera Utara.

- d. Adanya kebijakan pemerintah daerah provinsi Riau memberikan kesempatan bagi PNS untuk melanjutkan studinya ke jenjang S2 melalui bantuan pemberian beasiswa.
- e. Adanya kerjasama pemerintah provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota se Riau

D. Tantangan

- a. Terbatasnya tenaga pengajar tetap kualifikasi S3 bidang ilmu pemerintahan yang ada di perguruan tinggi Riau.
- b. Terbatasnya buku-buku literature perpustakaan Universitas dan fakultas.

Setelah menelaah secara mendalam kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, kesiapan sarana fisik maupun akademik, serta dana cadangan yang relatif memadai, maka dapat disimpulkan bahwa Program Pascasarjan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau siap untuk mengoperasionalkan.

**Jumlah Tenaga Administrasi dan Penunjang Akademik
Program Pascasarjana Universitas Islam Riau**

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	Nurman, SE	Sarjana Ekonomi	Ka. TU	Administrasi
2.	Yustinus Zebua, SH.	Sarjana Hukum	Staf TU	Administrasi
3	Drs. Syafril A, M. Si	Magister Adm.	Staf TU	Administrasi
4	Tati Maharani, SP	Sarjana Pertanian	Staf TU	Administrasi
5	Tengku Ediyanto	STM	Staf TU	Administrasi
6	Firdaus, S.Sos.	Sarjana Fisipol	Ka. Pustaka Universitas	Pustakawan
7	Amris, SH.	Sarjana Hukum	Ka. BAAK	UIR
8	Ahmad Kamal, SH.	Sarjana Hukum	Ka. BAU	UIR
9	M. Hariswanto, SE., M.Si	Magister Manajemen	Ka. Biro Keuangan	UIR

Sumber : Universitas Islam Riau, 2006.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Sufian. 1997. *Teori Administrasi Pembangunan*, UIR Press
- 1998. *Model Pembangunan Perdesaan yang Kontekstual*, UIR Press
- 2003. *Manajemen Strategis Dalam Pembangunan*, UIR Press.
- 2003. *Manajemen Strategis Pembangunan Daerah dan Perdesaan*, UIR

Jurnal :

- Sufian. (2001). Perencanaan Strategi dan Terpinggirnya Masyarakat Tempatan Dalam Proses Pembangunan, *Jurnal Siasat FISIP UIR*, Vol 10 No. 2, Agustus 2001.
- Sufian (2002). Manajemen Strategis Sumber-sumber Daya Pembangunan, *Jurnal Siasat FISIP UIR*, Vol. 11 No. 1 Juli 2002.
- Sufian (2003). Strategi Pembangunan Riau Mencapai Visi 2020 di Asia Tenggara, *Jurnal Industri Perkotaan Fisip UNRI*, Mei 2003
- Sufian (2004). Manajemen Strategis Pembangunan Perdesaan, *Jurnal Ekonomi UNPAD*, Juli 2004.
- Sufian (2004). Perkembangan Otonomi Desa di Indonesia, *Jurnal Siasat FISIP UIR, 2004*. Volume dan ISSN : 13,1,1410-1807 Press.

Peraturan Perundangundangan :

- UUD 1945;
- UU Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003;
- PP No. 60 tahun 1999
- Kepmendiknas RI No. 234/U/2000;
- Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 Jo No. 045/U/2002;
- Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 108/Dikti/Kep/2001.

Statuta Universitas Islam Riau, 2001

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Riau

Rencana Strategi Universitas Islam Riau, 2005

Baku Mutu dan Pengukuran Kinerja Universitas Islam Riau, 2005

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau, 2003.

TIM STUDI KELAYAKAN DAN PENGUSUL PROPOSAL

- I. Penanggung Jawab :
Prof. Dr. Hasan Basri Jumin, M.Sc (Rektor UIR)

- II. Tim Studi Kelayakan dan Pengusul Proposal :
 1. Prof. Dr. Sufian Hamim, M.Si (Direktur PPs Kerjasama UIR-UNPAD)
 2. Nurman, S.Sos, M.Si (Dekan Fisipol UIR)